

ISU Sepekan

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Minggu ke 3 September 2021 (tanggal 10 s.d 16 September)



**Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI**

PROBLEM GAJI GURU PPPK : DAERAH MERASA KEBERATAN

Anin Dhita Kiky Amrynudin
Peneliti Pertama Bidang Politik Dalam Negeri
anin.amrynudin@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Saat ini pemerintah tengah menyelenggarakan seleksi guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain terdapat kendala teknis dalam pelaksanaan rekrutmen, pemenuhan hak guru PPPK kedepannya masih menjadi masalah. Hal tersebut dikarenakan pemerintah dibebani gaji guru PPPK, sedangkan tidak semua keuangan pemda mencukupi.

Sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memprediksi sekolah di Indonesia kekurangan 1 juta guru setiap tahun sepanjang kurun 2020-2024 dan angkanya ditaksir terus meningkat. Berdasarkan data Kemendikbud tahun 2020 terdapat 72.976 guru pensiun. Jumlah tersebut menyumbang kekurangan guru yang angkanya mencapai 1.020.921 orang. Namun, adanya isu bahwa terdapat surat dari Kementerian PAN/RB yang berisi bahwa pemerintah daerah bersedia dan mampu menganggarkan usulan guru dan tenaga kependidikan honorer sejumlah yang disampaikan ke pemerintah pusat, menyebabkan pemda menjadi ragu untuk mengajukan formasi.

Seperti halnya Pemkab Temanggung yang merasa keberatan dengan hal ini, karena melihat dari struktur anggaran, sebanyak 58,6% dari Dana Alokasi Umum (DAU) setiap tahunnya habis untuk membayar gaji ASN. Sedangkan berdasarkan petunjuk dari pemerintah pusat, pemerintah daerah diminta menyediakan Rp 40 miliar untuk gaji PPPK yang sekarang sedang direkrut. Sementara Pemkab Temanggung juga harus membiayai 2.084 PPPK guru yang saat ini sedang direkrut, pengajian ini membutuhkan dana Rp 144 miliar.

SUMBER

Media Indonesia, 15 September 2021; CNNIndonesia.com, 25 Maret 2021 dan 6 Oktober 2020.